

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Palembang

(Studi Kasus KPP Pratama Palembang Ilir Barat)

Eko Sumberjaya*¹, Anton Arisman²

^{1,2}STIE MDP PALEMBANG; Jl. Rajawali No.14 Palembang, telp(0711) 376400

³Jurusan Akuntansi, Palembang

e-mail: *¹ekosumberjaya94@gmail.com, ²ariman@stie-mdp.ac.id

Abstrak

Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah penting yang menjadi perhatian bagi negara berkembang maupun negara maju. Masalah kepatuhan wajib pajak erat kaitannya dengan penerimaan pajak. Wajib pajak tidak patuh akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang akan menyebabkan penerimaan pajak akan berkurang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan peran konsultan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah di Kota Palembang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah yang terdaftar dalam KPP Pratama Ilir Barat Palembang. Sampel ditentukan dengan menggunakan metode Sample Random Sampling dengan 100 usaha mikro kecil dan menengah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuisioner kepada wajib pajak. Model yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan peran konsultan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah.

Kata Kunci—Pengetahuan Pajak; Sanksi Pajak; Peran Konsultan Pajak; Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract

Tax Compliance of Taxpayer is an important issue of concern to developing countries and developed countries. Tax compliance issues closely related to tax revenue. Non-compliant taxpayers will lead to a desire to take avoidance, evasion, smuggling and tax shirker, which will lead to reduced tax revenue. The purpose of this study is to determine the tax knowledge, tax penalties, and the role of tax consultant to the level of tax compliance of small and medium micro business in the Palembang City. This purpose is quantitative. The population of this purpose is taxpayers of small and medium micro business listed in KPP Pratama Ilir Barat Palembang. The sample was determining using sample random sampling with 100 persons. The data was collected by distributing the quisioner to taxpayers. Multiple Linear Regression was used to analyze the data. The research proved that theres's significant positif influence between tax knowledge, tax penalties, and the role of tax consultant to the level of tax compliance of small and medium micro business.

Key words—Tax Knowledge; Tax Penalties; The Role Of Tax Consultant; Tax Compliance

1. PENDAHULUAN

Suatu Negara akan memungut pajak warga negaranya sesuai undang-undang. Pungutan tersebut tidak memberikan imbalan secara langsung kepada warga negara. Sesuai undang-undang perpajakan, membayar pajak merupakan kewajiban dan hak dari setiap warga Negara untuk berpartisipasi dalam pembiayaan dan pembangunan Negara. Pemungutan pajak yang dianut Indonesia saat ini adalah *Self Assessment System*. Sistem yang menghitung, menyampaikan, dan membayar pajak sendiri. Sistem dilakukan untuk memberikan kepercayaan dalam menyetorkan pajaknya. Salah satu sumber pendapatan Negara berasal dari pajak yang digunakan untuk belanja dan pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, kantor polisi, halte, dan lain-lain.

Kepatuhan merupakan keadaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dan hak perpajakan. Masalah kepatuhan merupakan masalah utama untuk Negara maju dan negara berkembang. Jika kepatuhan rendah maka akan memunculkan tindakan penghindaran, penyelundupan, dan kelalaian pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pun dapat diperoleh melalui memberikan penjelasan pengetahuan perpajakan, sosialisasi dari petugas pajak, maupun bantuan dari pihak ketiga (konsultan pajak).

Pengetahuan akan pajak harus dimiliki setiap wajib pajak. Pengetahuan pajak yang baik akan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki oleh seorang wajib pajak, maka wajib pajak pun akan mengetahui apa saja yang berhubungan dengan pajak. Pengetahuan pajak ini dapat diperoleh melalui, buku-buku perpajakan, sosialisasi dari petugas pajak, iklan pajak di berbagai media cetak maupun media elektronik.

Sanksi pajak merupakan hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak ini, dapat berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Jika wajib pajak mematuhi perpajakan, maka wajib pajak pun akan terhindar dari sanksi pajak. Konsultan pajak juga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan. Seorang konsultan pajak adalah seseorang yang memberikan jasa perpajakan untuk wajib pajak agar memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Dengan kata lain, konsultan pajak juga dapat membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pada Kantor pelayanan pajak pratama Palembang Ilir Barat tingkat kepatuhan pajak belum maksimal. Hal ini ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar

Tahun	WP OP	WP Badan
2011	88.812	7.916
2012	86.633	8.843
2013	95.158	9.683
2014	104.390	10.503
2015	113.169	11.254

Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir barat, 2016

Tabel 1.2 Jumlah Penerimaan SPT Tahunan

Tahun	WP OP	WP Badan
2011	33.310	1.892
2012	36.405	2.182
2013	34.547	2.141
2014	42.303	2.263
2015	48.533	2.701

Sumber : KPP Pratama Palembang Ilir Barat, 2016

Berdasarkan tabel diatas, jumlah wajib pajak yang mendaftar dan jumlah penerimaan SPT tahunan pada setiap tahunnya meningkat. Tetapi realisasi jumlah penerimaan SPT tahunan tidak sesuai dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar.

Dewi Permatasari (2013) dengan hasil penelitiannya, pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Imam Fauzi, Srikandi Kumadji, Otto Budiharjo (2015) dengan hasil penelitiannya, kualitas jasa konsultan pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Arabella Oentari Fauzi (2012) dengan hasil penelitiannya, bahwa penggunaan konsultan pajak akan menjadi biaya kepatuhan. Sehingga peran konsultan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adanya variabel yang tidak konsistensi, yaitu peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, maka peneliti mencoba melakukan penelitian kembali. Hal ini dikarenakan terdapat fenomena yaitu jumlah penerimaan SPT tahunan tidak sama banyak jumlahnya dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar, khususnya di bidang usaha mikro kecil dan menengah sesuai gambar tabel 1.1 dan tabel 1.2 yang didapatkan dari KPP Pratama Ilir Barat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Peran Konsultan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Palembang (Studi Kasus di KPP Pratama Palembang Ilir Barat)”**.

1.1 Rumusan Masalah

- Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan peran konsultan pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Palembang?
- Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan peran konsultan pajak secara simultan terhadap kepatuhan UMKM di Kota Palembang?

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini yaitu, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan peran konsultan pajak terhadap kepatuhan UMKM di Kota Palembang. Hal ini dikarenakan jumlah penerimaan SPT Tahunan tidak sama jumlahnya dengan wajib pajak yang terdaftar di wilayah KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan peran konsultan pajak secara parsial terhadap kepatuhan UMKM di Kota Palembang.
- Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan peran konsultan pajak secara simultan terhadap kepatuhan UMKM di Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, dan mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama masa perkuliahan. Serta penelitian ini juga digunakan untuk melatih penyampaian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan merupakan syarat untuk mencapai gelar Strata satu (S1).

- Bagi Pembaca

Penelitian ini memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan akan perpajakan dan sebagai referensi penelitian selanjutnya. Serta untuk membantu memperoleh pemahaman yang lebih baik atas kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Palembang.

2. Manfaat Praktis

- Bagi KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Penelitian ini digunakan KPP Pratama Palembang Ilir Barat untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah kerjanya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi mempelajari suatu proses bagaimana seseorang menginterpretasikan terjadinya suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilaku (Suartana, 2010, h.181). Perilaku secara internal adalah perilaku yang berada di bawah kendali individu, sedangkan perilaku secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar individu. Dengan demikian, teori atribusi ini relevan digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan, untuk menjadi seorang wajib pajak yang patuh, wajib pajak dapat menggunakan faktor internal maupun faktor eksternal.

2.2 Teori Kepatuhan

Menurut H.C Kelman dalam (Anggraeni, 2011), menjelaskan bahwa kepatuhan diartikan sebagai suatu yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari dari hukuman. Hukuman tersebut berupa sanksi karena ketidakpatuhan. Dengan demikian, teori kepatuhan ini dapat menjadi tolak ukur dalam bidang perpajakan. Tolak ukur ini dapat digunakan terutama dalam hal pelaporan dan penerimaan pajak. Dengan adanya sanksi bila wajib pajak melanggar kepatuhan, maka akan dikenakan sanksi yang dapat membuat wajib pajak berubah untuk menaati peraturan.

2.3 Pajak

Dr. N.J Feldmann (Siti, 2013, h.3), mendefenisi Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak kepada pengusaha (menurut norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan digunakan untuk menutup pengeluaran umum.

2.4 Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2007 Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.5 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah usaha milik orang perorangan dan atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Dari sudut pandang pajak yang termasuk usaha mikro

kecil dan menengah adalah wajib pajak yang menjalankan pekerjaan bebas dan mendapatkan penghasilan bruto < Rp 4.800.000.000 per tahun baik wajib pajak pribadi maupun badan. Tarif pajak yang dikenakan yaitu 1% dari penghasilan bruto. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan pemerintah No 46 tahun 2013.

2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2010, h.138). Kepatuhan merupakan indikator penting dalam sistem pemungutan pajak yang digunakan Indonesia. Dua macam kepatuhan dalam perpajakan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah keadaan wajib pajak secara hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

2.7 Pengetahuan Pajak

Menurut Carolina (2010, h.6), pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang digunakan sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan menempuh strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

2.8 Sanksi Pajak

Sanksi pajak menurut Mardiasmo (2011, h.59) menyatakan sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dipatuhi. Sanksi pajak memiliki 2 jenis (Mardiasmo, 2011, h.59), yaitu:

a. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah sanksi yang diberikan pada wajib pajak yang melanggar kepatuhan wajib pajak yang merupakan palanggaran ataupun tindak kejahatan pajak yang dapat berupa kurungan ataupun denda.

b. Sanksi Administrasi

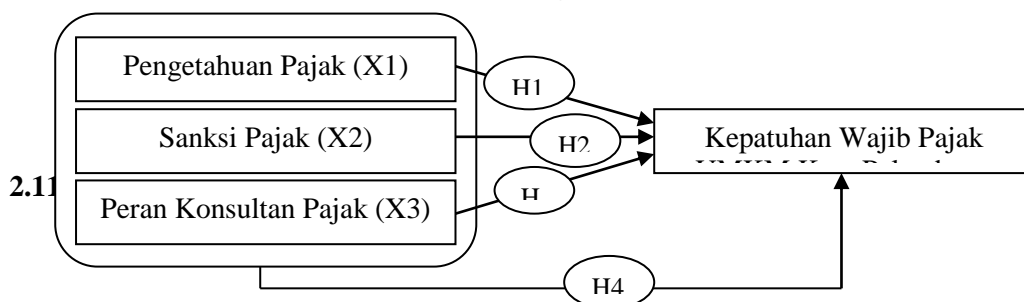
Sanksi administrasi merupakan pembayaran kepada Negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi dibedakan menjadi tiga yaitu, sanksi berupa bunga, sanksi berupa denda administrasi, dan sanksi berupa kenaikan (Diana Sari, 2013, h.270).

2.9 Konsultan Pajak

Konsultan pajak adalah orang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa profesional kepada para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

2.10 Kerangka Pemikiran

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



H1 = Pengetahuan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah di Kota Palembang.

H2 = Sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah di Kota Palembang.

H3 = Peran konsultan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah di Kota Palembang.

H4 = Pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan peran konsultan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah di Kota Palembang.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum permasalahan yang jelas mengenai fakta yang diteliti.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Objek penelitian dalam masalah ini adalah pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kota Palembang. Subjek dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara dan melakukan pembagian kuisioner terhadap responden yang berada di kantor KPP Pratama Ilir Barat Palembang.

3.4 Jenis Data

Dalam penelitian ini, data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan penyebaran angket. Dalam penelitian ini tidak menggunakan data sekunder.

3.5 Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah usahawan. Dari jumlah populasi yang didapatkan, tentunya tidak akan diambil seluruh dari populasi tersebut. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *simple random sampling* yang menyatakan bahwa (Sugiyono, 2010, hal. 217):

1. Jumlah sampel yang memadai untuk penelitian adalah berkisar antara 30 hingga 500.
2. Pada penelitian akan menggunakan analisis regresi berganda, ukuran sampel minimal 10 kali harus lebih besar daripada jumlah variabel bebas. Sementara itu, jumlah sampel yang harus diambil dalam menggunakan analisis regresi berganda adalah sekitar 15 sampai 20 kali dari jumlah variabel yang digunakan. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel, sehingga jumlah sampel menjadi bertambah, minimal $3 \times 20 = 60$ yang harus diambil.

3.6 Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2012, hal.31), definisi variabel penelitian adalah atribut seseorang atau objek yang memiliki variasi antara satu objek dengan objek lainnya yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari. Operasional variabel penelitian adalah konsep yang menjabarkan variabel yang ditetapkan serta memberikan informasi untuk mengukur variabel tersebut. Peneliti akan menjelaskan definisi operasional variabel sebagai berikut:

1. Variabel Bebas (Variabel Independen)

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Variabel bebas dalam penelitian adalah:

a. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan akan pajak akan membantu wajib pajak. Pengetahuan pajak akan membantu wajib pajak patuh akan perpajakan. Selain itu pengetahuan pajak ini akan membantu wajib pajak mengerti apa saja tentang pajak. Pengetahuan pajak ini akan diuji dengan menggunakan skala ordinal.

b. Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan cara untuk membantu kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak ini akan memberikan dampak positif bagi pelanggar pajak dan sanksi pajak ini akan di uji dengan menggunakan skala ordinal.

c. Peran Konsultan Pajak

Konsultan pajak akan membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak. Dengan adanya konsultan pajak ini di harapkan akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peran konsultan pajak ini akan di uji dengan menggunakan skala ordinal.

2. Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Kepatuhan wajib pajak merupakan variabel dependen yang akan di gunakan oleh penulis. Kepatuhan pajak ini akan di uji dengan menggunakan skala ordinal.

X1= pengetahuan pajak

X2= sanksi pajak

X3= peran konsultan pajak

Y = kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Palembang

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK01/2006 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan menteri keuangan nomor 67/PMK01/2008. KPP Pratama Palembang Ilir Barat ini didirikan sebagai bagian dari modernisasi DirJend Pajak dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan modern. KPP Pratama Ilir Barat ini berlokasi di Jalan Tasik Kambang Iwak Palembang, 30135.

Wilayah kerja KPP Pratama Palembang Ilir Barat ada 6 kecamatan di Kota Palembang. Enam kecamatan tersebut meliputi Ilir Barat I, Ilir Barat II, Bukit Kecil, Sukarami, Alang-Alang Lebar, dan Gandus.

4.2 Uji Normalitas

Pengukuran distribusi normal dengan menggunakan skewness dan kurtosis yaitu jika nilai kurtosis dan skewness berada di antara -1,96 sampai +1,96 dapat disimpulkan bahwa distribusi data adalah normal (Imam Ghazali, 2013, h.163).

Pada tabel 4.6 diatas, dengan menggunakan metode Skewnes dan Kurtosis dinyatakan distribusi data normal karena nilai skewness yaitu -0,523 sampai 1,595.

Tabel 4.1 Uji Normalitas

	N	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	100	-0.523	0.241	1.595	0.478
Valid N (listwise)	100				

4.3 Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas, jika nilai *tolerance* > 0,10 dan *VIF* < 10,00 maka multikolinearitas tidak terjadi (Duwi Priyatno, 2012, h.15). Pada tabel diatas nilai *Tolerance* semuanya diatas 0,10 dan nilai *VIF* semuanya di bawah 10,00, maka pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.2 Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kinerja_lingkungan	1.000	1.000
Kinerja_sosial	1.000	1.000

Pada tabel diatas nilai *Tolerance* semuanya diatas 0,10 dan nilai *VIF* semuanya di bawah 10,00, maka pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

4.4 Uji Heterokedastisitas

Tabel 4.3 Tabel Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.591	0.862		1.846	0.068
X1	0.065	0.092	0.097	0.709	0.480
X2	-0.147	0.081	-0.266	-1.817	0.072
X3	0.114	0.079	0.198	1.429	0.156

Metode yang digunakan dalam uji heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Glejser*. Jika nilai T hitung lebih kecil dari T Tabel (1,66088) dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas, dan sebaliknya. Dalam tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

4.5 Analisis Regresi Berganda

Tabel 4.4 Tabel Analisi Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	3.830	1.343	
X1	.412	0.143	0.311
X2	.267	0.126	0.246
X3	.185	0.124	0.164

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) = 3.830 + 0,412 Pengetahuan Pajak (X1) + 0,267 Sanksi Pajak (X2) + 0,185 Peran Konsultan Pajak (X3)

Persamaan regresi linear berganda tersebut mempunyai makna:

a. Konstanta = + **3.830**

Konstanta sebesar 3.830 dan bertanda positif menandakan bahwa jika ketiga variabel independen (pengetahuan pajak, sanksi pajak dan peran konsultan pajak) nilainya adalah nol, maka tingkat kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah sebesar 3.830.

b. Koefisien regresi variabel pengetahuan pajak = + **0,412**

Nilai koefisien regresi pengetahuan pajak sebesar 0,412 dan bertanda positif, ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak mempunyai hubungan searah dengan tingkat kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan pengetahuan pajak setiap 1 maka tingkat kepatuhan akan mengalami peningkatan sebesar 0,412, apabila variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

c. Koefisien regresi variabel sanksi pajak = + **0,267**

Nilai koefisien regresi sanksi pajak sebesar 0,267 dan bertanda positif, ini menunjukkan bahwa sanksi pajak mempunyai hubungan searah dengan tingkat kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan sanksi pajak sebesar 1 maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,267, apabila variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

d. Koefisien regresi variabel peran konsultan pajak = + **0,185**

Nilai koefisien regresi peran konsultan pajak sebesar 0,185 dan bertanda positif, ini menunjukkan bahwa peran konsultan pajak mempunyai hubungan searah dengan tingkat kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan peran konsultan pajak sebesar 1 maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,185, apabila variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

4.6 Uji t

Tabel 4.5 Uji t

Model	t	Sig.
1 (Constant)	2.853	0.005
X1	2.881	0.005
X2	2.120	0.037
X3	1.493	0.139

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 100 buah kuisioner untuk responden dan 4 buah jumlah variabel (k), yaitu X1, X2, X3, Y. sehingga diperoleh dengan rumus $n-k$ yaitu, $100-4=96$ dan hasil yang diperoleh pada t table diperoleh 1,66088

dan serta tingkat signifikan diperoleh 0,05 karena pada uji hipotesis menggunakan 1 arah. Jika nilai signifikan $< 0,05$ dan nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ maka H_0 diterima dan sebaliknya (Rusman, 2011:80).

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

a. Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan yang menunjukkan 0,05, angka ini menunjukkan bahwa nilai signifikan sama dengan $\alpha = 5\%$ dan nilai t_{hitung} lebih besar dari pada nilai t_{tabel} $2,881 > 1,66088$. Artinya, secara parsial pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah.

b. Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikan $0,037 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} $2,120 > 1,66088$. Artinya, secara parsial sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah.

c. Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa peran konsultan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan $0,139 > 0,05$, dan nilai t_{hitung} sebesar $1,493 < 1,66088$. Artinya, peran konsultan pajak berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7 Uji f

Tabel 4.6 Uji f

Model	F	Sig.
1 Regression	20.937	0.000 ^b
Residual		
Total		

Berdasarkan tabel hasil uji f diatas, maka dapat diperoleh bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $20,937 > 2,70$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Dengan nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan peran konsultan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah secara bersama-sama.

4.8 Uji Koefisien Determinasi

Sanusi (2011, h.136) mengemukakan bahwa koefisien determinasi (R^2) menjelaskan proporsi variasi dalam variabel terikat (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (lebih dari satu variabel: X_i ; $i = 1, 2, 3, 4, \dots, k$) secara bersama-sama. Lebih lanjut, R adalah koefisien majemuk yang mengukur tingkat hubungan antara variabel terikat (Y) dengan semua variabel bebas yang menjelaskan secara bersama-sama dan nilainya selalu positif. Persamaan regresi linear berganda semakin baik apabila nilai koefisien determinasi R^2 semakin besar (mendekati 1) dan cenderung meningkat nilainya sejalan dengan peningkatan jumlah variabel bebas.

Tabel 4.7 Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.629 ^a	0.396	0.377	2.244051

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai koefisien determinasi (*adjusted R²*) sebesar 0,377 atau (37,7%). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (pengetahuan pajak, sanksi pajak dan peran konsultan pajak) mampu menjelaskan pengaruh variabel dependen (kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah) sebesar 37,7%, dan sisanya 62,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4.9 Pembahasan

a. Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Hasil penelitian diatas menunjukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah. Artinya, semakin luas pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki oleh seorang yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah maka akan semakin meningkat pula tingkat kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah. Hasil penelitian ini juga didukung juga dengan teori atribusi dimana seseorang mempelajari suatu proses bagaimana seseorang menginterpretasikan terjadinya suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilaku. Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nirawan Adiasa (2013), yang menyatakan pada hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Hasil penelitian menunjukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah. Artinya, jika sanksi yang diberikan untuk wajib pajak yang melanggar semakin tegas dan berat, maka tingkat kepatuhan wajib pajak pun akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini juga didukung teori kepatuhan yang dikemukakan oleh H.C Kelman dalam (Anggraeni, 2011), menjelaskan bahwa *compliance* diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Penelitian ini juga memiliki hasil uji yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Permatasari (2013), yang menunjukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran konsultan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah. Artinya, peran konsultan pajak tidak memiliki pengaruh bagi kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah. Hasil penelitian ini didukung oleh *prospect theory* yang dikemukakan oleh Kahneman & Tversky (1979). Teori ini menyebutkan seseorang akan mencari informasi terlebih dahulu, dan kemudian akan dibuat beberapa *decision frame* atau konsep keputusan. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh imam fauzhi, Srikandi Kumadji, dan Otto Budiharjo (2015) yang menyimpulkan bahwa peran konsultan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tetapi penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Arabella Oentari Fauzi dan Yenni Mangoting (2012), yang menyimpulkan bahwa jika biaya kepatuhan naik sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan menurun.

5. KESIMPULAN

Pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah di Kota Palembang. Semakin luas pengetahuan pajak yang dimiliki oleh seorang wajib pajak, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dan sebaliknya, jika seorang wajib pajak tidak memahami pengetahuan perpajakan secara umum, maka wajib pajak tersebut akan tidak patuh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Palembang. Semakin berat sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika seorang wajib pajak telah mengetahui sanksi pajak dan apa saja yang akan diterimanya jika melanggar perpajakan, maka wajib pajak akan mulai mematuhi perpajakan dengan tujuan menghindari dan tidak terkena sanksi pajak.

Sedangkan peran konsultan pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Palembang. Hal ini dikarenakan wajib pajak menilai biaya dalam penggunaan konsultan pajak tergolong mahal dan akan menambah beban yang dikeluarkan wajib pajak tersebut. Tarif yang tinggi tidak sesuai lagi dengan keuntungan yang didapat seorang wajib pajak dalam menjalankan usahanya.

6. SARAN

1. Untuk pihak KPP Pratama Palembang Ilir Barat, agar memberikan sosialisasi perpajakan untuk masyarakat yang ada pada wilayah kerja KPP terutama untuk wajib pajak umkm di wilayah kerja KPP Pratama, agar masyarakat semakin memahami pengetahuan pajak dan sanksi pajak. Tujuannya agar masyarakat pun semakin patuh setelah memahami pengetahuan pajak dan sanksi pajak yang berlaku.
2. Bagi konsultan pajak, sebaiknya harga untuk pemberian jasa konsultasi lebih dapat diminimalkan. Tujuannya, agar masyarakat terutama wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah tidak akan ragu dan keberatan menggunakan jasa konsultan pajak karena segi harga jasa.
3. Tingkat kepatuhan UMKM di Kota Palembang harus lebih ditingkatkan agar penerimaan pajak Kota Palembang dapat terus meningkat yang berguna untuk pembangunan menjadi Kota yang lebih baik.

7. DAFTAR PUSTAKA

- [1]Adiyasa, Nirawan. 2013. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating*. Jurnal Akuntansi, Universitas Negeri Semarang.
- [2]Andriani. P.J.A. 2000. *Pajak dan Pembangunan*. UI Press, Jakarta.
- [3]Carolina, Veronica. 2010. *Pengetahuan Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- [4]Fauzi Imam, Srikandi Kumandji, Otto Budiharjo. 2015. *Pengaruh Kualitas Konsultan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Pengguna Kantor Konsultan Pajak Doni Budiono)*.Jurnal Akuntansi, Universitas Brawijaya.
- [5]Fauzi Arabella Oentari, Yenni Mangoting. 2012. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Jurnal Akuntansi, Universitas Kristen Petra.
- [6]Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multiwariat dengan Program IBM SPSS 21*. Edisi 5. Universitas Diponegoro, Semarang.
- [7]Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multiwariat dengan Program IBM SPSS 21*. Edisi 6. Universitas Diponegoro, Semarang.
- [8]Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multiwariat dengan Program IBM SPSS 21*. Edisi 7. Universitas Diponegoro, Semarang.
- [9]Hidayati, Nur. 2010. *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak*. Jurnal Akuntansi.
- [10]Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- [11]Khasanah, Septiyani Nur. 2013. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta*. 2013. Jurnal Akuntansi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- [12]Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi 2011*, Andi, Yogyakarta.
- [13]Permatasari, Dewi. 2013. *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi, Universitas Negeri Bandung.
- [14]Priyatni, Duwi. 2010. *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS dan Tanya Jawab Ujian Pendadaran*. Gaya Media, Yogyakarta.
- [15]Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- [16]Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus: Edisi Tujuh*, Salemba Empat, Jakarta.
- [17]Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus: Edisi Delapan*, Salemba Empat, Jakarta.
- [18]Sanusi, Anwar. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat, Jakarta.
- [19]Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. PT Refika Adimata, Bandung.
- [20]Safri, Ratriana Dyah. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Jurnal Akuntansi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- [21]Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak: Edisi Lima*. Salemba Empat, Jakarta.
- [22]Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- [23]Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta, Bandung.
- [24]Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia: Edisi 10*. Salemba Empat, Jakarta.
- [25]Widodo, Widi. 2010. *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Alfabeta, Bandung.